

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengamati tentang bagaimana marketing politik Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini layak untuk diteliti karena melihat Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada saat pemilu legislatif tahun 2019 kemarin mengalami penurunan jumlah kursi DPRD.

Pada 1984, ilmuwan politik Robert Huckshom memberikan sebuah “definisi pragmatis” tentang partai dalam buku teksnya *Political Parties in America*: “Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga Negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Bagi Huckshom *raison d’etat* untuk memiliki partai politik adalah sederhana: partai adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.<sup>1</sup>

Eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia. Partai politik dituntut mampu mewedahi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Semula partai politik hanya

---

<sup>1</sup> Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*. (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.3.

berfungsi artikulatif, yakni sebagai fasilitator antara rakyat dan pemegang kebijakan. Dalam perkembangannya, partai politik dianggap sebagai media yang cukup representatif dalam menentukan kebijakan publik.<sup>2</sup>

Dalam hal ini partai politik harus pandai dalam strategi untuk mencari dan mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik. Ada tiga strategi, yaitu pertama *push-marketing*, dalam strategi ini, partai politik berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulant yang diberikan kepada pemilih, kedua *pass-marketing*, strategi ini menggunakan individu atau kelompok yang dapat memengaruhi opini pemilih. dan ketiga *pull-marketing*, strategi ini menitikberatkan pada pembentukan *image* politik yang positif.<sup>3</sup>

Partai politik islam mulai muncul kembali ketika rezim Orde Baru yang berakhir pada tanggal 20 Mei 1998 dan terbitlah Reformasi, dari sinilah partai-partai politik Islam muncul kembali ke panggung politik di Indonesia. Hasil Pemilu 7 Juni 1999 telah membawa perubahan yang besar dimana para pendukung dan tokoh-tokoh umat Islam kembali memiliki akses ke pusat kekuasaan dan dapat memegang kembali posisi penting di pemerintahan Indonesia. Baik jabatan di legisala tif maupun di kabinet.<sup>4</sup>

Berdirinya partai politik berlabel Islam bisa dipahami karena secara empiris Indonesia memiliki basis agama yang kuat. Sementara secara historis, partai politik Islam pernah mewarnai sejarah kontemporer politik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Moh. Ali Andrias & Taufik Nurohman, *Partai Politik dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Postioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya)*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2013), hlm.352.

<sup>3</sup> Fimanzah, *Marketing Politik*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.218.

<sup>4</sup> Nasiwan, *Teori-Teori Politik*. (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.62.

Meskipun Orde Baru dapat dibidang belum ada Partai Islam yang dapat menguasai secara mutlak perpolitikan di Indonesia.<sup>5</sup>

Maka dari itu dengan runtuhnya Orde Baru adalah kesempatan bagi partai Islam untuk melancarkan strategi-strategi jitu agar dapat memenangkan suara dalam pemilihan umum. Dengan runtuhnya Orde Baru yang pada saat itu Golkar mutlak mendominasi, partai Islam dapat bersaing kembali pada pemilihan umum hingga ketinggian kabupaten/kota.

Perkembangan yang mengejutkan terjadi ketika partai-partai yang berasaskan Islam pada Sidang Tahunan MPR 1 yang berlangsung antara 7-18 Agustus tahun 2000 yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), (yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] ), serta mendapatkan dukungan dari Fraksi Reformasi, mengangkat isu tentang pentingnya amandemen UUD 1945 dengan mengembalikan tujuh kata yang berasal dari Piagam Jakarta.<sup>6</sup>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai hasil fusi (penggabungan partai-partai politik Islam) pada masa Orde Baru. Dari segi usia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat digolongkan sebagai partai yang relatif sudah tua, yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973. Partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), PERTI dan Parmusi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat partai Islam peserta Pemilu 1971 dan

---

<sup>5</sup> Delia, Noer, *Mengapa Partai Islam Kalah* (Jakarta : Alvabet, 1999), hlm.233.

<sup>6</sup> Nasiwan, *Teori-Teori Politik* (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm.62.

seorang ketua kelompok Persatuan Pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Tasikmalaya, Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai dominan. Dengan bukti nyata, bahwa putra-putri terbaik PPP telah menduduki kursi DPRD terbanyak dalam setiap periode pemilihan anggota legislatif. Hal ini terungkap, dari mulai periode kepemimpinan H. Tatang Farhanul Hakim 2001-2006, kemudian dilanjutkan ke periode selanjutnya tahun 2006-2011. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini H. Uu Ruzhanul Ulum yaitu berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.

Kepercayaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terhadap PPP sudah tidak asing didengar, karena bagi mereka memilih PPP merupakan budaya yang sudah melekat bagi mereka yang beragama Islam. Selain itu kepercayaan masyarakat tidak di sia-siakan oleh para kader PPP, karena dengan bukti nyata, para kader tersebut mendapatkan kursi terbanyak di DPRD.

Selain itu juga, isu-isu terkait penegakan nilai-nilai islam yang disponsori oleh PPP menjadi isu yang begitu laris di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini kemudian ditopang dengan aktivis politik para ulama di Kabupaten Tasikmalaya yang berlabel atribut PPP yang sering sejalan dengan isu penegakan nilai-nilai islam.

Secara ideologi partai menempatkan PPP sebagai partai dominan yang menempati urutan terbesar di Kabupaten Tasikmalaya. Pengaruh ideologi islam PPP tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

---

<sup>7</sup> Moch. Nurhasim, *Masa Depan Partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) hlm.164.

yang religius islami. Lahirnya ulama-ulama kharismatik yang memimpin pondok-pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, menempatkan PPP sebagai partai yang memikat hati masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki identitas keislaman yang sangat kental, dimana Kabupaten Tasikmalaya memiliki basis pesantren yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat mendominasi kekuasaan baik di bidang eksekutif maupun legislatif.

Tasikmalaya merupakan tempat yang sangat kental dengan nilai agama dengan masyarakatnya yang menjunjung nilai-nilai agama baik hubungan sosial dan juga berpolitik. Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan basis PPP yang mengalami berbagai masalah dan konflik akibat adanya perpecahan di tingkat nasional. Ini menjadi hal yang menarik karena mengingat Kabupaten Tasikmalaya merupakan basis PPP yang besar dengan keadaan geografis juga masyarakatnya yang terbilang agamis, dan banyak pondok pesantren. Hasil dari masalah ini menyebabkan PPP di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan suara pada pemilu tahun 2014. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Tasikmalaya sejak pemilhan legislatif dari tahun 2004-2014.

Tabel 1.1

**Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2004-2014**

2004		2009		2014	
PPP	12 Kursi	PPP	14 Kursi	PPP	9 Kursi
Golkar	12 Kursi	Golkar	8 Kursi	PDIP	8 Kursi
PDIP	7 Kursi	PDIP	7 Kursi	PKB	8 Kursi
PKB	5 Kursi	Demokrat	7 Kursi	Golkar	7 Kursi
PKS	4 Kursi	PKS	5 Kursi	PAN	6 Kursi
PAN	2 Kursi	PKB	5 Kursi	Demokrat	6 Kursi
PBB	1 Kursi	PAN	3 Kursi	Gerindra	4 Kursi
Demokrat	1 Kursi	PKPB	1 Kursi	PKS	2 Kursi
PBR	1 Kursi				

Sumber: kab-tasikmalaya.kpu.go.id

Dari hasil perolehan suara legislatif di atas, dapat dilihat bahwa ketika pemilu legislatif yang berlangsung pada tahun 2009-2014, PPP mengalami penurunan jumlah kursi yang pada awalnya mendapatkan 14 kursi tetapi pada pemilu legislatif 2014 hanya mendapatkan 9 kursi. Hal ini terjadi karena pergantian ketua DPC yang awalnya dipimpin oleh H. Tatang Farhanul Hakim dan digantikan oleh H. Ruhimat, karena pada masa kepemimpinan H. Ruhimat PPP memang sedang mengalami *problem* yang terjadi pada kepemimpinan pusat sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

Pecahnya kepemimpinan PPP pusat berpengaruh terhadap PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Hal yang sangat berpengaruh terhadap PPP

Kabupaten Tasikmalaya yaitu kurang kondusif nya kepemimpinan pusat, kemudian struktural itu sebagai penentu, seperti halnya dalam membenahan konsolidasi, dan juga dari sisi elektabilitas ketika terdengar ada *problem* maka otomatis PPP Kabupaten Tasikmalaya juga menjadi kurang baik di mata masyarakat sekitar.

Selain itu, kepemimpinan yang dipimpin oleh H. Ruhimat juga mengalami banyak faktor yang menyebabkan menurunnya PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti halnya, kurang memelihara struktural partai sebagai mesin politik, *micro targeting* yang tidak jelas, *micro marketing* seperti sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena H. Ruhimat terlalu melihat PPP di Kabupaten Tasikmalaya sudah berada di puncak kejayaan.<sup>8</sup>

Pada pemilu legislatif tahun 2019, Partai Persatuan Pembangunan jelas mempunyai strategi-strategi untuk memenangkan kembali pemilu legislatif. Strategi yang dijalankan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada saat ini yaitu, *micro targeting*, *micro marketing*, dan *micro canvassing*. *Micro targeting* yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan yaitu melalui media sosial, media sosial yang digunakan oleh Partai Persatuan Pembangunan yaitu akun facebook dimana dengan menggunakan akun facebook dapat efektif dalam melakukan kampanye, kemudian *micro marketing* yang dilaksanakan yaitu berupa pemasaran produk politik yang telah di rumuskan oleh partai dengan cara kampanye secara langsung kepada

---

<sup>8</sup> Wawancara bersama informan (Bapak H. Ujang Mulyana) Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya.

masyarakat. Dan *micro canvassing* yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan yaitu dengan cara berosiasi langsung kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Atas dasar data sebagaimana diuraikan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana marketing politik Partai Persatuan Pembangunan dan upaya pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya . Hal tersebut dianggap menarik untuk diteliti karena pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu Partai Persatuan Pembangunan mengalami penurunan jumlah kursi DPRD saat pemilu legislatif berlangsung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana marketing politik Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya?

## **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti membuat batasan masalah dengan tujuan agar terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud dalam laporan penelitian ini. Peneliti membatasi pada ruang lingkup penelitian tentang marketing politik Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya.

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama informan (Bapak H. Ujang Mulyana) Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk marketing politik Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian yang terfokus pada marketing politik Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya, maka manfaat penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang luas tentang bentuk marketing politik Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Bila memungkinkan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dan sekaligus sebagai acuan terutama dalam usahanya untuk menambah, mengurangi atau bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk membantah hasil penelitian sebelumnya yang sudah ada. Semua itu dilakukan semata-mata guna menyempurnakan hasil penelitian yang sudah ada.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perpolitikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan mahasiswa FISIP pada khususnya. Dan juga dapat memberikan evaluasi terhadap partai yang telah diteliti oleh peneliti yakni Partai Persatuan Pembangunan agar dapat

menghadapi pemilu legislatif 2019 sehingga dapat meraih kembali kursi terbanyak di pemilu legislatif nanti.